

Jokowi Acungkan Jempol untuk Prabowo dan Ganjar, Apa Artinya?

TANGERANG (IM) - Presiden Joko Widodo menjelaskan soal acungan jempol yang diberikannya untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat keduanya terlihat akrab ketika blusukan bersama di Pasar Grogolan Baru, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa (29/8) terekam dalam sebuah video.

Di video itu, keduanya tampak berjalan bersama-sama dan sempat beranggukan serta melakukan salam komando. Video tersebut diunggah di Instagram

story oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwiwijaya. Dalam video, awalnya tampak Prabowo dan Ganjar berjalan bersama di Pasar Grogolan Baru. Keduanya pun lantas beranggukan dan melakukan salam komando.

Momen tersebut mendapat perhatian dari Presiden Jokowi yang berada di dekat keduanya. Jokowi pun tertawa melihat keakraban Prabowo dan Ganjar. Kemudian, menunjuk keduanya secara bergantian sambil terus tersenyum kepada warga. Beberapa saat kemudian Presiden memberikan acungan jempol kepada keduanya. ● **han**

Saat ditanya apakah acungan jempol yang dilakukannya dalam rangka memberi kode untuk duet Prabowo - Ganjar untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024, Jokowi tidak langsung memberi jawaban. Ia justru menyinggung media yang sedikit-sedikit mengartikan perilakunya sebagai kode.

“Kamu ini dikit-dikit kode,” tutur Presiden. Diberitakan sebelumnya, momen Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa

Tengah Ganjar Pranowo yang mendapat sambutan meriah dari warga saat menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan di Pasar Grogolan Baru, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa (29/8) terekam dalam sebuah video.

Di video itu, keduanya tampak berjalan bersama-sama dan sempat beranggukan serta melakukan salam komando. Video tersebut diunggah di Instagram story oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwiwijaya. Dalam video, awalnya tampak Prabowo dan Ganjar berjalan bersama di Pasar Grogolan Baru. Keduanya pun lantas beranggukan dan melakukan salam komando.

Momen tersebut mendapat perhatian dari Presiden Jokowi yang berada di dekat keduanya. Jokowi pun tertawa melihat keakraban Prabowo dan Ganjar. Kemudian, menunjuk keduanya secara bergantian sambil terus tersenyum kepada warga. Beberapa saat kemudian Presiden memberikan acungan jempol kepada keduanya. ● **han**

KPK Lelang Mobil Honda CR-V Hasil Sitaan Korupsi Bupati HSU

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang satu unit mobil Honda Type RW188 Model CR-V 1.5 CVT Prestige Tahun 2020 warna Crystal Black Pearl seharga Rp386.590.000 (Rp386 juta). Mobil tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana mantan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid.

“KPK bersama dan melalui KPKNL Banjarmasin akan melaksanakan lelang barang rampasan Terpidana Abdul Wahid (Bupati Hulu Sungai Utara) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin yang berkekuatan hukum tetap,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (31/8).

Rencananya, lelang akan dilakukan dengan sistem penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang atau closed bidding. KPK

memastikan, obyek lelang berupa mobil Honda CR-V Prestige tersebut sudah disertai dengan BPKB asli. “Dengan harga limit Rp386.590.000 dan uang jaminan Rp150.000.000,” kata Ali.

Ali menjelaskan, calon peserta lelang dapat melihat unit mobil Honda CR-V Prestige yang akan dilelang tersebut pada Rabu, 6 September 2023, pukul 10.00 sampai 12.00 WITA di Rubbasan Klas I Banjarmasin, Jalan Pintu Air, Tanjung Rема Darat, Martapura, Banjar.

Sementara itu, lelang akan dilaksanakan pada Kamis, 7 September 2023 di Kantor KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin. Adapun, penawaran akan dibatasi hingga Kamis, 7 September 2023 pukul 10.00 WITA. ● **mei**

Rektor UNS Jamal Wiwoho Diperiksa Penyidik Kejati di Solo, Terkait Apa?

SOLO (IM) - Rektor UNS Prof Jamal Wiwoho, memenuhi panggilan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Semarang untuk diminta keterangannya soal pidana khusus, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Solo. Jamal terpaut tiba di kantor Kejati Solo sebelum pukul 09.00 WIB. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi Jamal meninggalkan Kejati.

Kepala Kejari Solo, DB Susanto membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Rektor UNS tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Kejati.

“Dari Kejati. Iya (Pemeriksaan Rektor UNS),” kata Susanto kepada awak media, Kamis (31/8).

Susanto menuturkan, Kejari Solo hanya dipinjam tempat saja. Dia enggan memberikan alasan dipanggilnya Rektor UNS itu.

“Kami hanya ketempatan saja, selanjutnya nanti ke Kasi Penkum (Penerangan dan Hukum). Selama ada pelaksanaan pemeriksaan, ketika lokasi di wilayah misal di Kota

Solo, Kejati atau Kejaksaan Agung bisa meminjam tempat di Kejati,” ucapnya. Alasan Kejati memeriksa Prof Jamal di Kejari karena Jamal berada di Kota Solo. Sehingga pemeriksaan bisa dilakukan di Kejari Solo.

Susanto menyebut ini merupakan kali pertama Rektor UNS tersebut diperiksa. Susanto menyebut Jamal diduga diperiksa terkait pidana khusus (pidsus).

“Kasus ini baru pertama kali. (Ruangan?) Kalau berkaitan bidang Pidsus, ya di (ruang) Pidsus. Saya kurang paham tahapannya apa, kalau pimpinan memberikan perintah pinjam tempat, ya kita kasih,” pungkasnya.

Belum diketahui pasti penyebab Jamal diperiksa oleh Kejati. Diduga, pemeriksaan Rektor UNS itu ada kaitannya dengan laporan dugaan korupsi rancangan kerja dan anggaran anggaran UNS yang sempat dilaporkan oleh mantan pimpinan Majelis Wali Amanat (MWA) UNS. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER MENTERI SOSIAL DENGAN KOMISI VIII DPR

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran Kemensos Tahun Anggaran 2022, laporan pelaksanaan anggaran Kemensos 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2024.

Soal Perppu Percepatan Pilkada, Jokowi: Apa Urgensinya, Alasannya Apa?

Menurut informasi, draf Perppu Percepatan Pilkada siap diterbitkan. Namun Jokowi mempertanyakan apa urgensi Pilkada dipercepat?

TANGERANG (IM) - Presiden Joko Widodo merespons kabar akan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mempercepat

pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Menurut Presiden, dirinya belum sampai kepada keputusan untuk menerbitkan Perppu. “Belum sampai ke situ kok

saya (menerbitkan perppu). Urgensinya apa, alasannya apa, semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam,” ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (31/8).

“Saya kira semua itu masih kajian di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan saya belum tahu mengenai itu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, wacana percepatan jadwal

Pilkada 2024 yang sedianya digelar pada 27 November 2024 semakin nyata. Kebijakan ini rencananya akan dituangkan melalui Perppu sebagai bentuk revisi atas Pilkada 2024 pada bulan November yang sebelumnya dijadwalkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sumber koran ini menyebutkan, draf perppu tersebut telah siap diterbitkan. DPR RI juga disebut telah mengetahui hal ini dan sudah tak memberikan resistensi berarti.

Ketua Kelompok Fraksi PDI-P DPR RI Anif Wibowo mengakui bahwa Komisi II DPR RI telah memperoleh paparan dari pemerintah terkait draf perppu percepatan pilkada.

Secara umum, pilkada akan maju ke September 2024 dan pemungutan suaranya digelar dua tahap, yaitu pada 7 dan 24 September 2024. Lalu, kepala daerah terpilih akan dilantik pada akhir 2024. Sejak tahun lalu, wacana ini sudah digulirkan meskipun tak secara terang-benderang dinyatakan sebagai usul atau rencana.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan sejumlah alasan Pilkada 2024 dianggap lebih baik dipercepat ke bulan September. Majunya jadwal ini sebagai bagian dari upaya mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah pada Desember 2024 serta dalam hal terbentuknya pemerintah yang sama.

“Selama ini, pilkada seren-

tak itu yang tercapai baru keserentakan pencoblosan, keserentakan pelantikan belum,” kata Hasyim dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8).

“Padahal dalam UU Pilkada ada, keserentakannya adalah bersama-sama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya paling akhir,” ujarnya.

Menurutnya, pemungutan suara yang baru digelar November 2024 terlalu dekat dengan rencana pelantikan pada Desember 2024, mengingat selalu ada kemungkinan digelarnya pemungutan dan penghitungan suara ulang hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena mungkin orang (calon) akan menggugat ke MK. (Kalau) MK membuat putusan pemungutan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, untuk mencapai keserentakan pelantikan agak berat,” ucapnya.

Dimajukannya jadwal pemungutan suara ke September 2024 dinilai memberikan ruang gerak yang leluasa apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilkada Serentak.

Hasyim mengaku telah mendiskusikan usul pemajuan Pilkada 2024 ke Presiden RI Joko Widodo.

“Kami pada saat audiensi dengan Presiden berbincang soal ini. Kira-kira, kemungkinan yang paling rasional atau memungkinkan, the most possible, kita akan ajukan supaya pencoblosannya September,” ujar Hasyim. ● **mei**

Mulai Muncul Wacana Duetkan Sandiaga-AHY, Begini Respons PPP

JAKARTA (IM) - Wacana duet Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai muncul ke publik. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek pun merespons kemungkinan duet Sandiaga-AHY.

“Kalau dari PPP sampai saat ini masih konsisten dan istiqomah dengan keputusan Rapimnas PPP,” kata Awiek kepada wartawan di Kompleks. Awiek menjelaskan Rapimnas PPP menghasilkan dua keputusan yakni bekerja sama dengan PDIP dan merekomendasikan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai bacawapres yang disodorkan kepada Ganjar Pranowo. Nah, selama hasil Rapimnas itu belum berubah maka PPP akan konsisten seperti itu,” kata Awiek.

Menurutnya, munculnya isu duet Sandiaga dan AHY hanyalah sebuah wacana. Namun, ia memastikan PPP tunduk pada mekanisme yang berlaku. “Soal wacana-wacana yang namanya wacana, ya biasa aja. Ada pengamat ngo-mong, media menilai dan relawan berkeinginan ya bisa saja, tapi kan kita tetap patuh dan tunduk terhadap mekanisme partai yakni keputusan Rapimnas,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana hitung-hitungan duet Sandiaga dan AHY muncul ke publik diungkapkan oleh pendukung yang juga sahabat Sandiaga, Miftah Sabri.

“Belakangan setelah melihat itu ada yang buat hitungan ternyata kalau PPP, Demokrat, PKS itu cukup almost (hampir) 21% (Presidential Threshold),” ujar Miftah di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8).

Wacana koalisi ini, terang Miftah, bisa menjadi opsi. Ia menyebut wacana ini bisa muncul karena bagi Demokrat, ketum mereka, AHY harus maju di Pilpres 2024.

“Mas Sandi harus ada tiket, harus ada di kertas suara,” lanjutnya.

Karena hal ini, tentunya opsi duet Sandiaga Uno-AHY, jelas Miftah, bisa saja terjadi. “Kita bisa bekerja sama juga jadi itu muncul opsi Sandi-AHY,” imbuh Miftah. ● **mei**

Terungkap, Mobil Rubicon Mario Dandy Dibeli Pakai Duit Gratifikasi Rafael Alun

JAKARTA (IM) - Terungkap bahwa jeep Wrangler Rubicon yang dikendarai Mario Dandy Satryo saat menganiaya Cristalino David Ozora, dibeli dari hasil pencucian uang dari ayahnya yaitu Rafael Alun Trisambodo.

Seperti diketahui, Rafael Alun sudah menjalani persidangan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Rabu, 30 Agustus 2023. Singkatnya Rafael Alun didakwa menerima gratifikasi dan penerimaan-penerimaan uang lain bersama-sama dengan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang totalnya Rp 100,5 miliar.

Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK terungkap bila salah satu aliran uang yang diterima Rafael Alun itu untuk membeli Jeep Wrangler Rubicon.

Hal itu muncul dalam dakwaan ketiga poin 16. Disebutkan bila Rubicon itu dibeli pada tahun 2021 di salah satu showroom di Jakarta Utara.

“Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, terdakwa (Rafael Alun) membelanjakan dan menempatkan harta kekayaan hasil penerimaan gratifikasi tersebut,” ucap jaksa dalam sidang yang berlangsung kemarin itu.

Jeep Wrangler Rubicon 3.6 A/T Tahun 2013 yang berkulir hitam itu dibeli seharga Rp 930 juta. Mobil itu

tersepat pelat nomor polisi atau nopol B 2571 PBP dengan STNK atas nama Ahmad Saefudin.

“Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka pembelian dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Albertus Katu,” ucap jaksa.

Pembayaran dilakukan Rafael Alun secara bertahap. Pertama Rafael Alun menggelontorkan Rp 30 juta sebagai uang muka. Setelahnya Rafael Alun langsung melunasi dengan valuta asing Rp 900 juta yang sebelumnya ditukarkan dulu di penukaran uang atau money changer.

Di dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan secara terang bahwa Rubicon itu adalah mobil yang digunakan Mario Dandy. Lantas dari mana diketahui bila mobil itu betul adalah Rubicon yang dikendarai Mario Dandy ketika menganiaya David Ozora?

Untuk menyegarkan ingatan, Rubicon yang digunakan Mario Dandy saat menganiaya David Ozora yaitu B 120 DEN. Namun ketika Mario Dandy dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba pelat nopol itu berubah menjadi B 2571 PBP. Ternyata Mario Dandy mengaku memerintahkan rekannya mengganti pelat nopol itu sekaligus mengamininya bila pelat nopol B 120 DEN itu palsu. Hal itu terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 4 Juli 2023.

“Apa alasannya? Kenapa kamu harus menyuruh Saudara Shane maupun AG untuk mengganti nomor pelatnya?” tanya hakim saat itu.

“Supaya ada pelat nomor aslinya, Yang Mulia, kan saat itu saya pakai pelat palsu kan itu,” jawab Mario.

“Kalau selama ini yang saudara pakai 120-DEN itu aslinya atau palsu?” tanya hakim.

“Itu pelat palsu, Yang Mulia,” jawab Mario Dandy. “Sejak kapan Saudara pakai itu?” tanya hakim.

“Sejak bulan Desember, Yang Mulia,” jawab Mario.

“Bukan pada saat untuk kepentingan menemui David?” tanya hakim. “Bukan,” jawab Mario. Dandy mengatakan pelat B-120-DEN itu sesuai dengan nama Instagramnya. Anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu ini mengaku mengganti pelat nopol agar terlihat keren.

“Apa maksudnya mengganti pelat palsu itu?” tanya hakim.

“Biar keren aja, Yang Mulia,” jawab Mario.

“Biar keren atau biar karena Saudara berkuasa gitu karena segala sesuatunya?” tanya hakim.

“Bukan, biar mobilnya ini, kan saya nama saya itu di IG kan broden. Nah, itu nama mobilnya biar jadi broden aja, jadi B-120-DEN,” ucap Mario. ● **han**

FOTO: ANTARA



FESTIVAL PERAHU DEMOKRASI DI LAMPUNG

Sejumlah perahu berhiaskan bendera partai dan penyelenggara pemilu mengikuti festival perahu demokrasi di Dermaga Pangkalan Pendaran Ikan (PPI) Lempasing, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (31/8). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Kirab Pemilu 2024 dengan mengutip tema Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang dilaksanakan secara estafet di seluruh kabupaten/kota untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu 2024.

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Sapbeverages Indonesia, berkedudukan di Depok (“Perseroan”) tanggal 30 Agustus 2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui penurunan modal dasar dalam Perseroan, dari semula Rp230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar) menjadi Rp23.316.537.500,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), serta modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan, dari semula Rp57.500.000.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp23.316.537.500,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Depok, 1 September 2023
Direksi Perseroan